

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perang saudara merujuk kepada suatu jenis dimana perang yang bukan dua atau lebih Negara yang menjadi kubu berlawanan tapi perang yang beberapa faksi atau saudara di dalam sebuah entitas politik atau bisa jadi di sebut *Civil war* yaitu adalah perang warga sipil atau , tidak jarang sebuah perang adalah sebuah awal perpecahan seperti yang terjadi pada perang saudara Tiongkok dan Taiwan (1945 – 1949).

Bersamaan dengan ekspedisi antara Chiang Khan Shek, dan secara esensial berakhir ketika pertempuran aktif utama berhenti pada tahun 1950 konflik ini akhirnya menghasilkan negara *de facto* yaitu Taiwan yang pergi ke Tiongkok tenggara daratan. Perang yang terjadi pada front politik dan ekonomi dalam bentuk hubungan lintas selat namun, kedua negara *de facto* terpisah ini memiliki hubungan ekonomi yang erat. (Lin and poston, 2011 : 1)

Sejak akhir perang sipil di Tiongkok pada tahun 1949 Taiwan menyatakan diri sebagai negara berdaulat secara *de facto* dengan mata uang, dan sistem peradilan mandiri, dan sistem politik pada April 1979, Presiden Chiang Ching Kuo dengan tegas menolak tawaran reunifikasi ini dengan kebijakan 3 penolakan yaitu : Tanpa kompromi, tanpa kontrak dan tanpa negosiasi dengan Tiongkok. (<https://m.detik.com> diakses pada tanggal 13 maret 2019)

Konflik bersenjata singkat yang terjadi antara Tiongkok dengan Taiwan. Tiongkok menyerang Taiwan yang pada saat itu berada di Kepulauan Yijiangshan, dan memaksa Taiwan untuk meninggalkan Kepulauan Tachen, yang pada akhirnya Tiongkok berhasil menguasai wilayah tersebut. Krisis ini terjadi tidak lama setelah Perang Korea yang diakhiri dengan gencatan senjata pada tahun 1953.

Amerika Serikat, yang memang tak menyukai rezim komunis Tiongkok bersekutu dengan Uni Soviet (Rusia) yang menjadi musuh AS saat perang dingin, melihat begitu besarnya pengaruh Tiongkok akhirnya memutuskan untuk bersekutu dengan Taiwan dan membantu mengevakuasi personel militer Taiwan dari Tachen ke Formosa . Meski akhirnya berakhir dengan gencatan senjata, krisis ini akhirnya berlanjut ke krisis selanjutnya di selat yang sama. (<http://www.taiwandocuments.org> diakses pada 23/03/2019)

AS mulai membuat suatu perjanjian terhadap Taiwan yaitu *Mutual Defense Treaty* dan *MAAG (Militer AS Advisory Group)*. Tidak hanya menjamin keamanan dan kelangsungan pemerintah Tiongkok di Taiwan. Didalam perjanjian AS-Taiwan, Amerika Serikat bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan Taiwan (Goldman, 2008:1)

Namun, Pada tahun 1970-an Hubungan diplomatik Taiwan dan AS dihentikan saat kunjungan presiden Richard Nixon ke Taiwan. Namun, AS sendiri melihat situasi *status quo* di selat Taiwan harus dipertahankan untuk memelihara perdamaian, akhirnya AS turun tangan dengan membuat suatu perjanjian dan kerjasama dengan pemerintah Taiwan dengan disepakatinya kerjasama *Taiwan*

Relation Act (TRA) pada tanggal 10 april 1979 walaupun itu adalah suatu hubungan tidak resmi.

Adanya upaya pemerintah AS yang tetap berusaha menjalin hubungan yang tidak resmi dengan pemerintah Taiwan didasarkan bukan karena pemerintah AS yang menginginkan kemerdekaan bagi Taiwan. Dan dari itu adanya upaya pemerintah AS menjalin kerjasama dengan Taiwan itu adalah satu cara untuk menjaga kestabilas dan perdamaian di kawasan Asia timur antara hubungan lintas selat antara Tiongkok dan Taiwan. (*United states congress 2014 : 10*)

Kebijakan AS yang ingin tetap berhubungan dengan Taiwan yaitu (*TRA*) *Taiwan Relation Act*. Adalah kerjasama Taiwan untuk memperoleh suplai persenjataan dari AS melalui transaksi perdagangan bilateral dan sebagai langkah awal, dalam memulai kerjasama penjualan senjata ke Taiwan bagi pemerintah Taiwan jika kedaulatan Taiwan terancam .

Dengan adanya perjanjian TRA tersebut membuat ketergantungannya Taiwan terhadap AS dan pada akhirnya secara struktural hubungan antara AS dan Taiwan semakin menguat. Dan semenjak terjadinya TRA , baik AS maupun Taiwan percaya bahwa ketegangan yang terjadi antara lintas selat antara Tiongkok maupun Taiwan dapat di atasi melalui jalur jalur secara damai. (*United states congress 2014:12*)

Hingga akhirnya hubungan AS dan Taiwan semakin menguat karena adanya TRA. Negara Taiwan memiliki sifat ketergantungan kepada AS, salah satunya adalah di bidang kemasukan, Tindakan AS membuat Tiongkok tidak puas dan

menjadi suatu ketakutan dengan pola tatanan AS yang ambigu, karena bukan hal baru untuk mengetahui AS adalah satu- satunya Negara adi kuasa militer di dunia.

Disisi lain AS pun menyetujui suatu perjanjian *Joint Communique* dengan Tiongkok pada tanggal 1 januari 1979, yang berisi pemerintah AS hanya mengakui pemerintahan Beijing adalah pemerintahan yang sah untuk mengatur seluruh wilayah Tiongkok, termasuk di dalamnya Taiwan, maka dari itu Tiongkok berupaya membatasi peran AS di wilayah Taiwan yang menjadi bagian dari provinsi Tiongkok, dengan menggunakan instrument kerjasama ekonomi yaitu ECFA.

ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*) awalnya dikenal sebagai "Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif" (CECA). Negosiasi perjanjian yang dimulai lebih awal dan diharapkan selesai pada tahun 2009. Ternyata tertunda sekitar satu tahun. Meskipun kesepakatan tentang ECFA akhirnya tercapai. Penundaan juga terlihat di bidang kebijakan penting seperti perlindungan investasi, kerja sama industri, kebebasan ataupun keselamatan pengusaha dan keluarga mereka.

Perjanjian ini diawali pada era terpilihnya presiden Taiwan Ma Ying-jeou pada 20 Mei 2008, Ma yang berusaha memulihkan hubungan Tiongkok dan Taiwan untuk meningkatkan secara pesat perekonomian. Ketika Presiden Ma Ying-Jeou dicalonkan menjadi kandidat presiden Taiwan dalam pemilu tahun 2008 sebagai calon dari Kuomintang, menginginkan kerjasama yang lebih baik dengan Tiongkok, mengingat keduanya mewarisi filosofi, tradisi, dan nilai kebudayaan

yang sama. dia menjanjikan untuk memperbaiki hubungan yang memburuk antara Tiongkok dengan Taiwan (<https://www.dw.com> diakses pada 11 Maret 2018)

Ma Ying-Jeou meyakinkan bahwa ECFA akan menguntungkan petani di Taiwan selatan yang akan dapat memasarkan buah-buahan, sayuran, dan produk lainnya di Tiongkok. Walaupun beberapa pemimpin DPP (Partai Progresif Demokratik) menyatakan bahwa itu hanya kemungkinan (taipeitimes.com diakses pada tanggal 15 Mei 2019).

Tiongkok yang bertujuan untuk melakukan perdamaian di Asia Timur dan murah hati ke Taiwan. Beberapa menyarankan itu akan mengarah pada kesepakatan dan penyatuan politik. Dan Lebih penting bagi Tiongkok, ECFA akan mengurangi ketegangan dengan Taiwan dan membantu para pemimpin Tiongkok mempromosikan strategi peningkatan damai, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dan dengan Amerika Serikat atas berbagai masalah. (Copper, 2010 : 1)

Akhirnya Tiongkok dan Taiwan membentuk sebuah kerangka kerjasama yang mengatur hubungan dagang keduanya yaitu tentang jenis barang yang di ekspor – impor , penyesuaian tarif, dll. yaitu ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*) yang menjadikan peristiwa sangat bersejarah bagi kemajuan lintas-selat Kerjasama yang disepakati pada tanggal 29 Juni 2010 ini telah memberi banyak perubahan antara hubungan Tiongkok dan Taiwan.

Karena, ECFA telah membuka pintu secara politik untuk kedua petinggi negara setingkat menteri dapat melakukan pertemuan resmi. Setidaknya, ECFA

merupakan sebuah momentum yang mengurangi ketegangan politik Tiongkok dan Taiwan yang sudah berlangsung bertahun-tahun (Sidabutar, 2012 : 6)

Pembentukan hubungan ekonomi yang dilembagakan tampaknya merupakan cara yang tidak dapat dihindari untuk mengamankan manfaat Taiwan dalam pertukaran ekonomi Lintas Selat. Tetapi hubungan ekonomi yang dilembagakan itu pada gilirannya akan mengikat ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok lebih dalam. Meskipun rekonsiliasi politik masih merupakan masalah jangka panjang, meningkatnya ketergantungan ekonomi dan perdagangan Taiwan terhadap Tiongkok akan menempatkan pulau itu dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam negosiasi di masa depan. (Chiang dan Gerbier. 2013:16)

Selain itu, ECFA dengan bertujuan memperkuat dan memajukan kerjasama ekonomi perdagangan investasi antara Tiongkok dan Taiwan mempromosikan liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara bertahap membangun investasi yang adil, transparan dan mekanisme perlindungan investasi selain itu ECFA bertujuan untuk memperluas area kerjasama ekonomi dan membangun mekanisme kerjasama. (Tujuan perjanjian kerjasama ECFA , pasal1)

Dengan adanya perjanjian ECFA ada hal yang menarik dimana perjanjian yang telah di sepakati antara Tiongkok dan Taiwan tersebut memiliki ketidak seimbangan di salah satu pihak yaitu pihak Tiongkok. Salah satu isi perjanjian dagang yang berupa penghapusan tarif dari 800 jenis barang, termasuk melonggarkan dibidang finansial, yaitu memangkas tarif 539 ekspor Taiwan ke Tiongkok dan 267 produk Tiongkok yang memasuki Taiwan,

Membuat Taiwan menjadi tempat kepentingan strategis global di bidang teknologi tinggi, secara khusus, Negara ini memiliki system legislative yang lebih sehat dan undang – undang hak kekayaan intelektual yang lebih kuat dari pada Tiongkok daratan.Selain itu, ECFA meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual perusahaan yang berbasis d Taiwan.

Namun dengan adanya skema pengurangan tarif tersebut, Taiwan akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan Tiongkok melalui penghematan biaya ekspor ke Tiongkok dengan US\$ 13,838 juta, sedangkan Tiongkok hanya akan mendapatkan keuntungan sebesar US\$ 2,858 juta. (Lung, 2014 : 10)

Walaupun tanpa disadari Taiwan akan mengalami ketergantungan dalam bidang ekonomi ketergantungan terhadap Tiongkok, salah satunya melalui sektor ekonomi. Selain itu dengan adanya ECFA, akan semakin meningkatnya citra di wilayah Taiwan tanpa harus mengambil resiko dengan menentang status quo dalam bidang - bidang ini pendekatannya telah bergeser dari menandatangani perjanjian sekaligus untuk mendukung berlakunya perjanjian sementara yang pada akhirnya mengarah pada perjanjian permanen. Perjanjian ini membuktikan bahwa kesulitan negosiasi telah meningkatkan partisipasi Taiwan dalam komunitas internasional juga telah berubah.(Matshuda , 2015 : 43)

ECFA tidak hanya menanamkan kekuatan baru ke dalam ekonomi Taiwan, tetapi juga membuka peluang baru yang luar biasa untuk kerja sama dan kemakmuran antara daratan Tiongkok dan Taiwan. Memang, bertujuan untuk secara signifikan mengurangi tarif dan hambatan komersial, perjanjian ambisius

menandai terobosan signifikan dalam hal normalisasi, pelebagaan dan liberalisasi hubungan ekonomi lintas-Selat.

ECFA telah meletakkan dasar yang kuat untuk pengembangan bersama dan kesejahteraan bersama dari kedua belah pihak di seberang Selat. Tantangan dalam Hubungan Lintas-Selat di Era Pasca ECFA Normalisasi, pelebagaan dan liberalisasi hubungan ekonomi dan sosial lintas-Selat tidak hanya membawa manfaat besar bagi masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan, tetapi juga sangat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di Asia Timur. Selat Taiwan telah berubah dari titik nyala potensial untuk konflik menjadi pusat pembangunan dan kemakmuran (<https://jamestown.org> diakses pada 11 april 2019)

ECFA memiliki implikasi yang signifikan tidak hanya dalam arti ekonomi, tetapi juga dalam arti politik juga. Ada banyak kontroversi di Taiwan mengenai ECFA, partai-partai yang berkuasa dan oposisi berada di sisi yang berlawanan dari perdebatan tentang ECFA. Pemerintahan Ma Ying-jeou mempromosikan kesimpulan awal ECFA sebagai elemen kunci dari kebijakan ekonominya untuk mencegah marginalisasi dan isolasi ekonomi Taiwan, serta untuk menangkalkan konsekuensi negatif dari perjanjian perdagangan bebas Tiongkok dengan ASEAN. Di sisi lain, partai-partai oposisi berhasil karena Partai Progresif Demokratik (DPP) dan Uni Solidaritas Taiwan (TSU) menentang penandatanganan ECFA karena kekhawatiran tentang dampaknya pada industri domestik seperti pertanian dan industri ringan, dan kekhawatiran bahwa hal itu dapat menyebabkan Taiwan dianeksasi oleh Tiongkok. (Green dan Cooper, 2009)

Dari sisi lain , Dengan Perjanjian ECFA yang nyatanya memang ketika diimplementasikan tidak memiliki keuntungan yaitu yang bersifat resiprokal bagi Tiongkok, seolah menandakan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sangat menguntungkan pihak Taiwan. ECFA menjadi sebuah perjanjian yang membuat keinginan Taiwan menjadi dapat terlibat dalam integrasi ekonomi dengan Tiongkok melalui perdagangan bebas (Yang, 2010 : 2).

Padahal seharusnya dengan performa ekonomi Tiongkok yang menduduki kebangkitan ekonomi yang kuat, Tiongkok mampu menjadikan posisi itu untuk mengubah posisinya dalam kesepakatan ECFA, agar mendapatkan keuntungan yang resiprokal, karena performa sebuah ekonomi adalah suatu ukuran kekuatan nasional sebuah Negara.

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi kedua belah Pihak, untuk secara bertahap mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi satu sama lain, menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi yang adil , lebih jauh memajukan hubungan perdagangan dan investasi lintas-Selat dengan menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama Ekonomi Lintas-Selat, dan membangun mekanisme kerja sama yang bermanfaat bagi kemakmuran ekonomi dan pembangunan di seluruh Selat.

Tujuan Perjanjian ini adalah:

1. Untuk memperkuat dan memajukan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi antara kedua Pihak

2. Untuk mempromosikan liberalisasi perdagangan barang dan jasa lebih lanjut antarakeduanya Para pihak dan secara bertahap membangun investasi yang adil, transparan dan fasilitatif dan mekanisme perlindungan investasi
3. Untuk memperluas area kerja sama ekonomi dan membangun mekanisme kerja sama. (Naskah perjanjian ECFA pasal 1)

Hingga pada tanggal 20 Mei 2016, era kepemimpinan Ma Ying-Jeou yang menggambarkan ECFA sebagai pencapaian penting dan pencapaian yang dicapai dengan cara demokratis berakhir. Dan tergantikan dengan terpilihnya presiden perempuan pertama yaitu Tsai Ing-Wen. Yang berasal dari partai Demokrat Progresif (DPP) yang condong lebih kepada kemerdekaan Tiongkok dan Taiwan. Hingga saat 2017 Tsai Ing-wen mengumumkan inisiatif perdamaian yang menciptakan hubungan baik dengan Tiongkok. Tsai Ing-We menyakinkan Tiongkok dengan adanya aksi militer pun tidak akan menyelesaikan konflik di antara keduanya. (<https://www.bbc.com> diakses pada 11 April 2019)

Karena melihat hubungan bilateral kedua negara antara Tiongkok dan Taiwan yang hingga saat ini masih belum dapat dikatakan baik sepenuhnya, dan perjanjian yang hanya menguntungkan sebelah pihak yaitu Taiwan Ada sesuatu rencana tersendiri yang ingin diraih oleh Tiongkok ataupun Taiwan di dalam terjadinya perjanjian ECFA.

Meski Pada tahun 1971, Taiwan telah menempati kursi perwakilan Tiongkok di PBB sebelum kalah pengaruh dari Partai Komunis di Beijing. Dalam hubungan Tiongkok-Taiwan sangat buruk, diwarnai dengan konflik kecil yang dikhawatirkan akan menjadi perang terbuka. Bahwasannya banyak pihak dari

Taiwan yang mendesak deklarasi kemerdekaan. Namun Tiongkok pada tahun 2005 telah menerbitkan undang-undang, yang berisikan ancaman aksi militer jika Taiwan mengumumkan merdeka. (<https://www.cnnindonesia.com> diakses pada tanggal 11/3/2019)

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen meminta masyarakat internasional untuk "bekerja bersama untuk menegaskan kembali nilai-nilai demokrasi dan kebebasan kita untuk membatasi Tiongkok dan juga meminimalkan perluasan pengaruh hegemonik mereka. mempertahankan *de facto* daripada kemerdekaan *de jure* untuk Taiwan, melakukan urusan lintas selat sesuai dengan ROC. konstitusi dan undang-undang yang ada, dan menghormati perjanjian lintas-selat yang sebelumnya dinegosiasikan Beijing yaitu ECFA (www.foreignaffairs diakses pada tanggal 18/05/2019)

Pada saat ini pun dengan menunjukkan konflik diantara keduanya mulai mereda, walaupun demikian pihak Taiwan tak lengah karena tak dapat dipungkiri dilihat dari sejarah kedua Negara tersebut yang selalu mengalami konflik dan ketegangan yang tak pernah usai. Hingga sekarang Tiongkok masih menganggap Taiwan merupakan bagian dari RRC dan belum mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat. Walaupun secara fisik berdamai akan tetapi diantara kedua negara tersebut masing-masing memiliki strategi untuk mempertahankan kedaulatan negaranya (<https://www.cnnindonesia.com> diakses pada 11/04/2019)

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji Hubungan Tiongkok Taiwan Paska *Economic Ccooperation Framework Agreemen* tahun 2010 -2018 peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan.

Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan penulis adalah penelitian Briansyah Sujarwo Putro dari program studi ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya pada tahun 2013 dengan judul “Kepentingan Politik Luar Negeri Tiongkok di Wilayah Taiwan melalui ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*)” Dalam penelitian ini Briansyah Sujarwo Putro membahas mengenai bagaimana Tiongkok memanfaatkan perjanjian ECFA sebagai alat untuk mempertahankan wilayah Tiongkok dalam Kepentingan politik luar negeri. Briansyah Sujarwo Putro menyimpulkan bahwasanya kepentingan politik Tiongkok untuk mencapai kepentingannya di wilayah Taiwan. Sebuah kepentingan Tiongkok akan pencapaian national interest-nya di wilayah Taiwan yang pada akhirnya membawa Tiongkok bersedia untuk meratifikasi perjanjian ECFA

Penelitian yang kedua adalah “*The Economic Integration of Taiwan and Tiongkok and its Implications for Cross-strait Relations*” penulis yang bernama Ezra N. H. Chen dalam program Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University Pada bulan juli 2003. Dalam penelitian ini Ezra N.H Chen membahas peningkatan kekuatan pasar Taiwan setelah pertukaran pasar ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan, dan adanya sebuah ketergantungan Taiwan kepada Tiongkok di masa lalu karena adanya alih – alih takut kekosongan ekonomi Taiwan.

Penelitian yang terakhir adalah penelitian Avina Nadhila Widarsa, dari program studi Ilmu Hubungan Internasional , Universitas Indonesia pada dengan judul “Kepentingan Tiongkok dengan penandatanganan *Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement* dengan Taiwan Tahun 2010 “ dalam penelitian

ini Avina Nadhila menyimpulkan bahwa Tiongkok memiliki kepentingan di balik penandatanganan ECFA. Adapun kepentingan politik Tiongkok dalam penandatanganan ECFA adalah sebagai tahap awal , untuk mencapai reunifikasi secara damai dengan Taiwan dan sebagai pembuktian upaya *peacefull development* yang dilakukan Tiongkok di kawasan asia Timur. Selain itu, Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga aliran dana infestasi langsung dari Taiwan yang menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Tiongkok. maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : “Hubungan Tiongkok – Taiwan paska *Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)* tahun 2010 ”

Dalam melakukan penelitian dan mengangkat masalah ini, penulis mendapat dukungan dari beberapa mata kuliah studi Hubungan Internasional, antara lain:

1. Politik Internasional, melalui mata kuliah politik interasional dapat dijelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lainnya, di dalam interaksi tersebut masing-masing negara membawa kepentingan negaranya masing-masing yang dituangkan dalam kebijakan luar negerinya.
2. Politik Luar Negeri, melalui mata kuliah politik luar negeri dapat menggambarkan dan menjelaskan mengenai politik luar negeri suatu negara, termasuk didalamnya kebijakan serta respon terhadap dinamika politik internasional, serta bagaimana tindakan yang

dilakukan oleh negara tersebut terhadap lingkungan diluar wilayahnya

3. Ekonomi Politik Internasional, Dengan matakuliah Ekonomi Politik Internasional dapat menjelaskan kerjasama antar Negara dalam menyelesaikan masalah ekonomi lintas perbatasan seperti Tiongkok dan Taiwan dengan kerjasama lintas selat
4. Informasi dan komunikasi internasional, dengan matakuliah ini peneliti dapat memiliki data dan informasi yang dilakukan suatu Negara Negara yang menyampaikan pesan berkaitan kepentingan negaranya ataupun informasi lain , maka dari itu peneliti dapat menemukan banyak informasi untuk melakukan penelitian kerjasama Tiongkok dan Taiwan ini.
5. HI di asia timur , Dengan mata kuliah ini pneliti dapat mengetahui Hubungan di kawasan Timur seperti Tiongkok dan Taiwan .

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

”Bagaimana Hubungan Tiongkok – Taiwan Pasca Disepakatinya ECFA tahun 2010-2018”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa kepentingan Tiongkok ataupun Taiwan dalam menjalin kerjasama ECFA ?

2. Keuntungan apa saja yang diperoleh Tiongkok ataupun Taiwan dalam melaksanakan Kerjasama ECFA ?
3. Bagaimana prospek hubungan Tiongkok – Taiwan paska ECFA?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Sejak berpisahnya Taiwan dengan Tiongkok pada tahun 1945, karena pihak Taiwan yang ingin melepaskan diri dari Tiongkok karena suatu permasalahan perang saudara yang berbeda ideologi. dan menjadi hubungan yang sangat sulit karena mengalami pasang surut hingga saat ini.

Hingga beberapa upaya yang dilakukan Tiongkok maupun Taiwan untuk merubah Hubungan lintas selat yang bertujuan memperkuat ikatan ekonomi dan kerjasama ekonomi yang terbentuk dalam ECFA pada tahun 2010 hingga saat ini. Maka dari itu peneliti mengambil permasalahan Bagaimana Hubungan Tiongkok dan Taiwan paska terjadinya Perjanjian ECFA pada tahun 2010 hingga 2018, karena pada tahun 2010 diresmikannya perjanjian ECFA oleh Tiongkok dan Taiwan , dan data yang dipakai oleh peneliti hingga akhir tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisa Hubungan Tiongkok dan Taiwan setelah terjadinya perjanjian ECFA pada tahun 2010-2018

1.3.2 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui apa kepentingan Tiongkok ataupun Taiwan menjalani kerjasama melalui ECFA ?
- 2 Untuk mengetahui keuntungan yang telah didapat oleh Tiongkok maupun Taiwan pasca terjadinya ECFA.
- 3 Untuk mengetahui bagaimana prospek hubungan Tiongkok – Taiwan pasca ECFA

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan pengetahuan tambahan dan menambah pembendaharaan pustaka, serta dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai Perjanjian Internasional , Kerjasama Internasional dan memahami Analisis dari bagaimana Hubungan Tiongkok Taiwan paska terjadinya ECFA pada 2010 – 2018

1.4.2 Kegunaan Praktis

Untuk sumbangan pengetahuan khususnya bagi penstudi Hubungan Internasional Dalam Analisa dari Pengaruh. Hubungan Tiongkok Taiwan paska terjadinya ECFA pada 2010 – 2018.